

PANCASILA DI ERA PASKA IDEOLOGI

Widodo Dwi Putro
Fakultas Hukum, Universitas Mataram
email: widodo.fhunram@gmail.com

disampaikan 12/5/19 – di-review 29/5/19 – diterima 25/6/19
DOI: 10.25123/vej.3233

Abstract

It is considered axiomatic that Pancasila has been accepted as State ideology (formally and final) and in addition been perceived as the ultimate source of all legal sources. But this acceptance as axiom leads to the fact that Pancasila has almost never been reflected upon. This said in consideration that the basis for this ideology, the contemporary society tends to be suspicious of ideology or grand narratives. This article, as a reflective-critical analysis, shall discuss how Pancasila is understood by the Indonesian post ideological society. The critiques put forward is meant to offer an alternative value transformation for a society disillusioned by grand narratives.

Keywords:

axiomatic, Pancasila, post ideology, critical reflective, transformation

Abstrak

Pancasila adalah ideologi Negara yang final, sumber dari segala sumber hukum diterima sebagai suatu aksioma. Hal ini menyebabkan keberadaan Pancasila nyaris tidak pernah direfleksikan secara kritis. Sementara, masyarakat, basis sosial yang menjadi tempat berpijak ideologi, justru kehilangan kepercayaan dan menolak ideologi sebagai narasi besar. Tulisan ini, sebagai kajian reflektif-kritis akan menelusuri bagaimana Pancasila dipahami di era pasca ideologi. Kritik yang diajukan dimaksudkan sebagai tawaran transformasi nilai bagi masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap narasi-narasi besar.

Kata kunci:

aksioma, Pancasila, paska ideologi, refleksif-kritis, transformasi

Pendahuluan

Pada awal abad ke-21, masyarakat terkesan hidup tanpa memegang teguh ideologi dan lebih pragmatis, atau yang lebih dikenal masyarakat paska ideologi (*post-ideological*). *Post-ideological* dalam kamus Oxford diartikan sebagai, “*designating or relating to a time in which (a particular) society is no longer characterized by a strong adherence to political or social ideologies.*”¹

Daniel Bell justru memuji kematian atau berakhirnya ideologi-ideologi, sembari mengatakan, perpolitikan tanpa ideologi telah mendorong Barat menuju

¹ *Oxford Dictionaries*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-ideological>.

masyarakat yang lebih rasional.² Sebaliknya, Michael Freeden mencemaskan gambaran masyarakat seperti itu. Ia menulis bahwa “orang yang tidak ideologis hanyalah orang yang telah meninggal dengan sedih.”³

Dalam masyarakat paska ideologi yang semakin “mencair” (*liquid modernity*)⁴, orang-orang sekarang apatis dengan narasi-narasi besar. Mereka lebih suka ‘nongkrong’ di pusat perbelanjaan (mall), sibuk memainkan *smartphone*, bergosip skandal artis, konser musik, transfer bintang sepak bola, perkembangan *game*, hingga curhat galau percintaan. *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Snapchat*, dan masih banyak lagi, mengubah cara berkomunikasi generasi milenial. Demikianlah tampak semakin banyak orang terkena autis, semakin individualistik, lebih sibuk dengan *smartphone* masing-masing. Semangat komunal “*Ho Lapis Kuntul Baris*” menguap diganti dengan gaya hidup dan konsumerisme.

Kalau pun anak-anak muda masih fanatik, hal itu ditujukan bagi tim sepakbola kesayangan. ‘*Hidup Bonek! Hidup bobotoh! Hidup the Jak!*’ Lihat saja, ratusan ribu pendukung membanjiri stadion membela klub sepak bolanya masing-masing. Bak perang antar ‘ideologi’, dengan bendera di tangan, mereka berani mati ‘hanya’ karena membela klub sepak bola.

Sementara itu, sebagian dari kelompok masyarakat yang lain yang hidupnya lebih ‘tertib’ juga berpikir pragmatis; bagaimana bisa mendapatkan kerja mudah, bisa mengambil kredit mobil, lalu kawin dan mempunyai anak yang lucu-lucu. Mimpi anak-anak muda seperti mimpi yang ke sana-kemari, tidak bisa diikat dalam satu ide kolektivitas yang bernama ideologi.

Ketika segelintir jenderal purnawirawan meributkan soal kebangkitan komunis, beritanya sempat muncul di koran, tapi ‘gosip ala Orde Baru’ itu tidak

² Daniel Bell, *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in Fifties*, Free Press, New York, 1960, hlm. 13-18.

³ Michael Freeden, *Confronting The Chimera of A ‘post-ideological, Age 1*, ECPR Joint Sessions of Workshops, Uppsala, 13-17 April 2004.

⁴ Zygmunt Bauman membuat metafora masyarakat modern dengan istilah “fluidity” atau “liquidity.” Lihat: Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity*, Polity Press, Cambridge, 2000, Hlm. 53-80 dan 130-137. Lihat juga: Rolf Petri, *A Short History of Western Ideology. A Critical Account*, Bloomsbury Publishing, London, 2018, hlm. 131-133.

bertahan lama. Isu kebangkitan hantu komunis tenggelam oleh gosip tentang kehidupan para artis dan berbagai iklan gaya hidup.

Kalau pun ada yang menyinggung soal Pancasila, mereka tidak bicara substansi, tapi karena ada pendangdut yang mempelesetkan Sila Kelima Pancasila sebagai bebek nungging'. Uniknya, polemik kasus pelecehan simbol negara berujung pada ide pengangkatan pendangdut 'si goyang itik' itu menjadi Duta Pancasila.⁵

Kita hidup di era masyarakat tanpa lagi memegang ideologi. Pertanyaan yang hendak dikaji di sini adalah: bagaimana eksistensi Pancasila di era paska ideologi? Demokrasi liberal membuat orang dan masyarakat merasa tidak perlu mengubah dunia lagi karena demokrasi telah memberikan fasilitas kebebasan. Persoalannya, apakah kita menyerah begitu saja pada realitas dan meninggalkan tanggung jawab sosial?

Ideologi pada era paska ideologi mungkin layu, tapi tidak pernah mati-mati, karena ia merupakan produk dari perkembangan kesadaran masyarakat itu sendiri. Bagaimana idealnya Pancasila dipandang dan dimaknai dalam konteks sekarang ini? Bagaimanakah pendekatan metodologis yang tepat dalam mentransformasikan nilai-nilai, budaya dan ideologi Pancasila?

Tulisan ini berupaya mendekati masalah tentang hubungan antara pemikiran Pancasila dan ideologi dengan membahas gagasan-gagasan dari lintas bidang disiplin yang terkait dengan refleksi tentang hukum, yakni disiplin teori hukum, teori-teori sosial (*social theories*), dan filsafat politik. Sebagaimana layaknya penelitian filsafat hukum, metodologi penelitian ini bersifat refleksif-kritis, mempertanyakan eksistensi dan relevansi Pancasila sebagai ideologi di era paska ideologi. Penulis mengawali dengan menelusuri dokumen-dokumen yang

⁵ Ide ini sempat diprotes, misalnya, di forum "serius" yang bertajuk Pelatihan Untuk Pelatih Sosialisasi Empat Pilar MPR bagi para dosen se-Provinsi Lampung. Menanggapi kritik, Ketua Fraksi PKB MPR RI, Abdul Kadir Karding yang menjadi pembicara dalam forum tersebut mengatakan bahwa "Pengangkatan Zaskia sebagai duta (Pancasila) ... karena sosialisasi yang dilakukan para artis akan lebih gampang dipublikasikan oleh media dibanding politisi." Isu bebek nungging dan duta Pancasila bahkan menjadi *trending topic* di media sosial Twitter. Isu itu sempat menempati posisi teratas dari 10 trending topic Twitter Indonesia. <http://bangka.tribunnews.com/2016/04/10/zaskia-gotik-sila-bebek-nungging-hingga-jadi-duta-pancasila>.

berisi pidato-pidato para pendiri bangsa untuk menggali spirit awal perumusan Pancasila. Metode penelitian filsafat hukum ini mengkaji literatur, terutama diskursus ideologi sebagai lokus kajian. Untuk menjawab pertanyaan eksistensi Pancasila di era paska ideologi, penulis mendialogkan spirit ideologi Pancasila dengan kenyataan yang terus bergerak, yakni bagaimana ideologi yang menjanjikan kemakmuran dan keadilan sosial di ranah *das sollen* dengan kenyataan (*das sein*) di era masyarakat yang semakin cair dan tidak lagi memegang teguh ideologi. Penulis juga mengkritisi implikasi perselisihan-perselisihan ideologi besar yang berakhir pada dominannya ideologi tertentu. Meski penelitian ini bersifat konseptual, kritik terhadap ideologi dimaksudkan sebagai sebuah praksis yakni, sebuah tawaran untuk mentransformasi Pancasila sebagai nilai, budaya dan ideologi terbuka di tengah era paska ideologi.

Pembahasan

Ideologi antara *Das Sollen* dan *Das Sein*

Jauh sebelum filsuf dan sosiolog Jerman dari Mazhab Frankfurt, Jürgen Habermas, menawarkan demokrasi deliberatif,⁶ para pendiri bangsa telah mempraktikkan demokrasi deliberatif sewaktu merumuskan ideologi dalam sidang BPUPKI, sebagaimana dapat dibaca dalam kutipan dari pidato Soekarno berikut:

“Kita hendak mendirikan Negara Indonesia Merdeka di atas ‘Weltanschauung’ apa? Nasional – Sosialisme – kah, Marxisme – kah, San Min Chu I – kah atau ‘Weltanschauung’ apakah?”⁷

Di sini, Soekarno sadar bahwa para pemimpin yang hadir dalam sidang BPUPKI lebih banyak perbedaannya dibanding persamaannya sehingga perlu mencari persetujuan “*philosophische grondslag*” atau “*weltanschauung*”.

“Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam, tetapi alangkah benarnya

⁶ Tentang gagasan demokrasi “*deliberative*” lihat, Jürgen Habermas, *Communication and The Evolution of Society*, Heinemann, London, 1979.

⁷ Dikutip dari pidato Soekarno 1 Juni 1945 di depan Sidang BPUPKI. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Edisi IV, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 92.

perkataan Dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu "*weltanschauung*" yang kita semuanya setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju..."⁸

Ketika menyampaikan pidatonya tersebut, Soekarno menyinggung tentang kebangsaan, dan berkali-kali ia meminta maaf. Rupanya pada waktu itu masalah kebangsaan sangat sensitif.

"Saya minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain : maaf saya memakai perkataan, "kebangsaan" ini! Saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan..."⁹

Lantas,

"...Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan Kebangsaan Jawa, bukan Kebangsaan Sumatra, bukan Kebangsaan Borneo, Selebes, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar *nationale staat*. Maaf, Tuan Lim Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku-Kaityoo, Tuan menjawab: Saya tidak mau kebangsaan".

("Bukan begitu. Ada sambungannya lagi," sahut Liem Koen Hian)

"Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena Tuan Lim Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan..."¹⁰

Soekarno merumuskan 5 (lima) dasar Pancasila dengan urutan: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme, atau perikemanusiaan; 3) Mufakat, atau demokrasi; 4) Kesejahteraan; 5) Prinsip Ketuhanan. Urutan itu menunjukkan bahwa dasar yang ditempatkan pada urutan pertama bukanlah Ketuhanan, melainkan Kebangsaan. Soekarno mengusahakan persatuan di antara kelompok Nasionalis, Islam, dan Komunis. Di samping itu, Soekarno juga merangkul

⁸ *Id.*

⁹ *Id.*

¹⁰ *Id.*, 96.

kelompok Timur Asing (Cina dan India) dengan menawarkan filsafat San Min Chu-I dan Gandhi. Ketika menjelaskan Sila Kedua, Soekarno mengutip pemikiran Gandhi bahwa "*Saya seorang nasionalis, tapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan. My nationalism is humanity*".¹¹

Ideologi dianut karena diyakini akan membawa negara-bangsa ke arah kemakmuran dan keadilan.¹² Pidato Soekarno pada saat sidang perumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 menyatakan pandangannya bahwa:

"Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu 'prinsip kesejahteraan', 'prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka'... Apakah kita mau Indonesia Merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, atautkah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?"¹³

Hatta memasukkan sila keadilan sosial itu ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya akan disebut dengan UUD NRI 1945) dalam sistem ekonomi koperasi, yakni Pasal 33 UUD NRI 1945, yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." 'Asas kekeluargaan' itu adalah koperasi.¹⁴

Setelah menjadi presiden, Soekarno konsisten dengan prinsip 'Keadilan Sosial', dalam Kursus Pancasila 21 Februari 1958 mengatakan:

"Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan... Semua berbahagia, cukup sandang, cukup pangan..."¹⁵

¹¹ *Id.*, 97.

¹² Tujuan dari setiap ideologi politik adalah untuk menghindari penderitaan manusia dengan menggabungkan ide-ide, emosi, dan orang-orang dalam moda produksi perubahan sosial yang mendasar. Ideologi harus memiliki ketiga variabel ini untuk mendapatkan kekuatan yang diperlukan sehingga berhasil sebagai kekuatan politik. Jadi, alasan penciptaan ideologi politik sebagai "pelarian" keluar dari ketidakadilan yang dirasakan. Lihat: Hanna Samir Kassab, *The Power of Emotion in Politics, Philosophy, and Ideology*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York, 2016, Hlm. 2-9.

¹³ Wawan Tunggul Alam (ed.), *Bung Karno Menggali Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 2000, Hlm. 25.

¹⁴ Muhammad Hatta dan Zainul Yasni, *Bung Hatta Menjawab: Wawancara Dr. Mohammad Hatta dengan Dr. Z. Yasni, Cet-3, Gunung Agung*, Jakarta, 1980, Hlm. 199.

¹⁵ Wawan Tunggul Alam, *Demi Bangsaku Pertentangan Bung Karno vs. Bung Hatta*, Gramedia, Jakarta, 2003, Hlm. 377.

Pada bulan Juni 1958, 5 (lima) bulan setelah ia mengumumkan sistem sosialisme ala Indonesia yang disebutnya 'Sosialisme Pancasila', Soekarno menjelaskan bahwa sistem tersebut tidak akan berhasil diterapkan di Indonesia tanpa kerjasama politik internasional dengan negara-negara lainnya, yakni negara-negara yang baru merdeka di Asia-Afrika.¹⁶

Ideologi alih-alih membawa kemakmuran sebagaimana yang dijanjikan. Pertikaian antar ideologi justru mengantarkan jutaan manusia pada tebing kematian. Bahkan, berubah menjadi ladang pembantaian sesama manusia atas nama keagungan cita-cita.

Di Indonesia pada tahun 1965, misalnya setelah gerakan "30 September" terjadi pertikaian antar-ideologi yang banyak mengorbankan nyawa manusia. Paska peristiwa 1 (satu) malam itu menenggelamkan begitu banyak korban. Sekitar 500 (lima ratus) ribu jiwa korban pembantaian massal (versi lain, jumlah lebih besar dari itu) dan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang dibuang tanpa proses peradilan ke Pulau Buru. Implikasinya panjang, jutaan keluarga mengalami perlakuan diskriminasi dan stigma sosial, bahkan residunya masih bisa dirasakan hingga sekarang.¹⁷

Sewaktu Orde Baru berkuasa, volume perselisihan antar ideologi kemudian diperkecil dan digantikan dengan pelaksanaan program-program pemerintah. Pada masa rezim Soeharto, ideologi-ideologi di luar Pancasila, terutama komunisme¹⁸ dilarang dipelajari dan kita hanya mengenal ideologi tunggal, yakni Pancasila. Mendudukkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi menandai berakhirnya politik aliran.

¹⁶ Ferry Hidayat, Pancasila: Perspektif Pendiri RI dan Problematikanya, STIBA Pertiwi, Bekasi, Tanpa Tahun, Hlm. 27.

¹⁷ Lihat: Rian Adhivira Prabowo, Homo Sacer 1965: Perampasan Hak dan Pelampauan Atasnya, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2015.

¹⁸ TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia memuat pernyataan bahwa Partai Komunis Indonesia merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ketetapan tersebut juga memuat larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis atau marxisme-leninisme. Demikianlah, ketetapan tersebut menjadi aturan induk mengenai larangan paham Marxisme, Komunisme, dan Leninisme.

Tahap demi tahap Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal yang hanya bisa ditafsirkan oleh negara. Ideologisasi tunggal ini dilegalisasikan oleh rezim Orde Baru dengan dikeluarkan Tap MPR No. II/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) serta Keputusan Presiden No. 10/1979 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pembinaan dan Pendidikan P4 (BP7). Sejak saat itu pola indoktrinasi ideologi Pancasila dilakukan melalui jalur pendidikan nasional. Proses ini dilanjutkan dengan dikeluarkan Tap MPR No. II/1983 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang mengharuskan semua partai politik, golongan karya, dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) berasaskan Pancasila. Ideologisasi Pancasila menuntut kepatuhan, mereka yang mencoba berada di luar jalur akan distigmatisasi sebagai "Anti- Pancasila".¹⁹

Setelah Orde Baru tumbang, orang trauma dan sudah 'letih' dengan ideologisasi Pancasila. Pada awal reformasi, negara terasa berjalan tanpa ideologi, tidak tahu apa yang sedang dan akan diperjuangkan. Tanpa ideologi, negara sebagai organisasi kekuasaan hanya dijadikan tempat kumpul, curhat, arisan hingga memperkaya diri.

Pancasila seperti kunang-kunang yang tetap berkedip walau malam semakin larut. Sesekali Pancasila diperbincangkan dan dirindukan terutama ketika merosotnya rasa kebangsaan dan intoleransi yang diikuti meletusnya konflik di Sambas, Sampit, Aceh, Jakarta, Ambon, Poso, Lombok hingga Tolikara. Ketika terjadi konflik, intuisi orang-orang yang sedang lemah biasanya mencari pegangan pada narasi besar untuk mempersatukan kembali. Sebagian orang kemudian merindukan kembali ke "rumah Pancasila" sebagai pengikat kolektivitas suatu bangsa.

Masyarakat Paska Ideologi

Ideologi seperti "*pharmacon*", ular yang membelit gelas *whisky*: bisa sebagai obat sekaligus racun. Sebagai obat, ideologi dibutuhkan sebagai pengikat kolektivitas untuk menjadi sebuah gerakan yang terarah guna meraih cita-cita

¹⁹ Peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni kemudian diganti dengan peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Pancasila sakti, dianggap sebagai azimat. Ketika kita mengatakan Pancasila sakti, ada metafisika yang dipegang dibalik kata Pancasila.

tertentu. Reo M. Cristenson menjelaskan fungsi ideologi, yakni “*to unite people in political organization for effective political action.*” Lebih lanjut, masih menurut Cristenson, “*the goal of ideology is to arouse feelings and incite action, and the power of the ideology derives from its capacity to capture the human imagination and mobilize and unleash human energies.*”²⁰

Ideologi sebagai “racun”, wataknya yang dogmatis, cenderung mencekik leher masyarakat dan mencegah pertumbuhan ide-ide baru yang berseberangan dengan ideologi itu sendiri. Govand Khalid Azees & Alejandra Gaitan-Barrera mengingatkan bahwa, “*The synthesis of different modalities of power and ideological frameworks has ensured an overpowering and suffocating interpellation of the subject.*”²¹

Ideologi tidak pernah datang dari ide penganutnya, karena umumnya bukan hasil refleksi melainkan doktriner sehingga mengerdilkan daya kritis penganutnya. Dalam masyarakat ideologis, menurut John Schwarzmantel, pandangan dominan tentang kehidupan yang baik tersebar dalam masyarakat dan membentuk kesadaran subjek.²² Seorang Hegelian sangat percaya bahwa roh absolut sebagai kebenaran akhir.²³ Seorang Marxis sangat meyakini bahwa semua persoalan bisa dijelaskan dengan Materialisme Dialektika Historis.²⁴ Begitu pula, kita menganggap Pancasila adalah inti dari yang paling inti. Ada kebutuhan untuk berpegang pada sesuatu dalam bentuk ideologi atau semacam keyakinan akan kebenaran akhir.

Meminjam cara berpikir Auguste Comte²⁵, ideologi dan filsafat dipisahkan. Ideologi kemudian diartikan cenderung mempertahankan klaim kebenaran, sedangkan filsafat selalu membuka diri pada kemungkinan kebenaran. Seolah-

²⁰ Reo M. Cristenson (et.al), *Ideologies and Modern Politics*, Dodd, Mead & Company, New York, 1975, hlm. 6.

²¹ Lihat: Khalid Azees & Alejandra Gaitan-Barrera, *Power, Ideology, Politics and the Revolutionary Subject, Critique Journal of Socialist Theory*, Volume 501, 2017, hlm. 45.

²² John Schwarzmantel, *Hegemony and Contestation in Post-Ideological Society, ECPR Joint Sessions of Workshops, Uppsala*, 13-17 April 2004.

²³ G.W.F. Hegel, *The Phenomenology of Mind*, trans. B.J. Baillie Blackmask Online, 2001, hlm. 7-8, 10, dan 29.

²⁴ Jonathan Wolff, *Why Read Marx Today*, Oxford University Press, Oxford, 2002, hlm. 21-28.

²⁵ Lihat: Auguste Comte, *A General View of Positivism (1865)*, trans. H.J. Bridges, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, tanpa halaman.

olah filsafat dil luar ideologi, atau sebaliknya. Padahal filsafat tidak mungkin bersih sama sekali dari kepentingan ideologis, seperti keyakinan akan kebenaran. Bukankah diskursus dalam filsafat juga ideologi? Karena ideologi dipisahkan dari filsafat, ideologi kemudian dianggap sebagai klaim kebenaran final.

Ideologi masih dianggap sebagai dasar dari sebuah kelompok, termasuk dasar filosofis, tata nilai dan tata kelola hidup sehari-hari. Ideologi diandaikan memiliki kemampuan menjelaskan bahwa ia benar pada dirinya. Ideologi diumpamakan sebagaimana matahari, ia tidak perlu mendapat bantuan sinar dari benda lain untuk menyatakan dirinya sebagai sinar, karena ia sendiri adalah sumber sinar yang menerangi yang lain.

Ideologi secara konsep sering dipahami berbeda-beda. Sesekali ideologi dicemooh sebagai kesadaran palsu, ditakuti seperti hantu. Ideologi kadang berperan sebagai dogma, apabila realitas tidak sama dengan ideologi, maka realitas yang menyesuaikan dengan ideologi. Ideologi memperkosa realitas karena ideologi diandaikan lebih riil dari realitas itu sendiri. Di lain waktu, ia dipuja sebagai keyakinan yang menyerupai agama sehingga penganutnya rela berkorban demi memperjuangkan ideologinya.

Ideologi memang berwajah ganda, seperti dikatakan Ernst Bloch yang dikutip ulang generasi penerusnya Douglas Kellner dalam artikel lepasnya "Ernst Bloch, Utopia and Ideology Critique" sebagai berikut, "*For Bloch, ideology is "Janus-faced", two-sided: it contain errors, mystifications, and techniques of manipulation and domination, but it also contains a utopian residue or surplus that can be used for social critique and to advance progressive politics.*"²⁶

Para ideolog kapitalisme, misalnya, berlomba-lomba melahirkan teori-teori modernisasi dan pembangunan untuk membendung pengaruh sosialisme – komunisme dan antikapitalisme di negara-negara Ketiga. Unikny dalam tubuh kapitalisme sendiri terjadi pertarungan teoritik antara Neo Klasik (Keynesian) yang masih menginginkan campur tangan negara (*welfare state*) dengan

²⁶ Douglas Kellner, "Ernst Bloch, Utopia and Ideology Critique Douglas Kellner" dalam artikel lepasnya "Ernst Bloch, Utopia and Ideology Critique", <http://www.uta.edu/huma/illuminations/kell1.htm> (diakses 24 November 2008).

Neoliberalisme yang menghendaki kedaulatan pasar sepenuhnya. Pertikaian saudara ini “diselesaikan” Neoliberalisme dengan pembagian peran: Milton Friedman melucuti pemikiran ekonomi Neo Klasik²⁷ dan Frederick von Hayek melawan sosialis-komunis²⁸ dengan ditunjang lembaga dana internasional (*World Bank*, IMF, WTO, dan sebagainya).

Di sisi yang berseberangan, para teoritis sosialis-komunis melahirkan teori-teori yang menelanjangi keserakahan kapitalisme sekaligus kritik (anti) terhadap kapitalisme seperti teori “Materialisme-Dialektika-Historis” (Karl Marx), teori “Strukturalis” (Althusser), teori “Hegemoni” (Antonio Gramsci), dan teori ketergantungan (Samir Amin, Aude Gunder Frank, dan sebagainya).²⁹

Selain itu, dalam kelompok “kiri” muncul teori “Kritis” (Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, dan sejumlah penerusnya) yang berusaha menyingkap dan menyobek selubung-selubung ideologis yang menutupi kenyataan tak manusiawi dari kesadaran manusia. Dengan membuka kedok-kedok ideologis dalam segala hal -termasuk bangunan teori Kritis itu sendiri- teori Kritis hendak mengajukan kembali maksud dasar Marx, yaitu membebaskan manusia dari belenggu penindasan dan pengisapan, tetapi secara kritis dan antidogmatis.³⁰

Di luar kubu kapitalisme dan sosialisme, muncul Posmodernisme sebagai kritik terhadap modernisme dan keluar dari tradisi *enlightenment*. Meski beraneka warna, filsafat bernapaskan posmodernisme bersatu dalam penolakan “cerita-cerita besar” (*grand narrative*) penyelamatan manusia, menolak pemikiran dikotomis (*binary opposition*), dan menolak obyektivitas ilmu pengetahuan. Penekanan posmodernisme pada *right of different* (hak untuk berbeda) sehingga tidak ada kebenaran tunggal (yang ada adalah “kebenaran dan kebenaran”).

²⁷ Lihat: Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, University of Chicago Press, Chicago, 1962, tanpa halaman.

²⁸ F. A Hayek, *The Fatal Conceit: The Errors of Socialism*, Vol. 1 of The Collected Works of F. A. Hayek, ed. W. W. Bartley III, University of Chicago Press, Chicago, 1989.

²⁹ Widodo Dwi Putro, Pertikaian Ideologi: Dari “Hubungan Produksi” sampai “Kesadaran” , Kompas, 23 September 2002.

³⁰ *Id.*

Dengan gaya dekonstruksinya, posmodernisme memutus (*discontinuity*) rantai perdebatan “kanan-kiri” beserta seluruh rasionalitas yang membenarkannya.³¹

Pada paruh kedua abad ke-20, kita menyaksikan bahwa era perang ideologi akan berakhir dengan kemenangan kapitalisme-liberal. Pada awal 1960-an, para penulis Prancis dan Amerika, Raymond Aron, Daniel Bell, dan Seymour Martin Lipset menulis tentang “akhir ideologi”.³² 30 (tiga puluh) tahun kemudian, Francis Fukuyama, menangkap semangat paska runtuhnya pemerintahan otoritarian pada 1970-an dan 1980-an di Eropa, Amerika Selatan, dan lain-lain (Yunani, Spanyol, Argentina, Brazil, dan sebagainya) mendahului runtuhnya komunisme sesudah 1989. Ia memotret gerakan menuju demokrasi dan kapitalisme sebagai bagian dari pola umum evolusi sejarah. Fukuyama menyebut zaman ini sebagai “titik akhir dari evolusi ideologis manusia dan bentuk final “pemerintahan manusia”. Alasannya, telah terjadi kesepakatan luar biasa berkenaan dengan pengakuan terhadap demokrasi liberal sebagai sistem yang diterima di seluruh dunia.³³

Fukuyama cenderung melihat perkembangan ideologi berjalan linier - padahal ideologi bukan seperti film India, dimana skenario bercerita yang benar pada akhirnya akan menang karena dilindungi oleh para dewa. Kemenangan kapitalisme, mungkin lebih disebabkan pendukungnya mempunyai kekuatan, bukan karena teori itu lebih manusiawi, lebih baik, apalagi lebih benar.

Sementara eksistensi ideologi Pancasila - yang diartikan bukan kapitalisme dan bukan sosialisme - nyaris tak terdengar dalam pertarungan ideologi-ideologi besar itu. Kita hanya menyaksikan kebijakan tambang, perusahaan hutan, sumberdaya air, agraria dan barang publik lainnya yang pengelolaannya diserahkan kepada privatisasi swasta sudah cukup menjelaskan ke arah mana ideologi kita berjalan.

³¹ *Id.*

³² Lihat: *Raymond Aron, The Opium of the Intellectuals*, Norton, New York, 1962, tanpa halaman; *Daniel Bell, The End of Ideology*, The Free Press, New York, 1960, tanpa halaman; *Seymour Martin Lipset, Political Man*, Heinemann, London, 1960.

³³ Lihat: *Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man*, The Free Press, New York, 1992, tanpa halaman. Lihat juga: *Eliane Glaser, Anti-Politics: On the Demonization of Ideology, Authority and the State*, Repeater Books, London, 2018, hlm. 41-43.

Kalau anda berwisata ke Pulau Lombok hampir sepanjang pantai yang melingkari pulau itu telah habis dikapling-kapling investor. Atau, kita pergi ke daerah yang lebih terpencil seperti pulau-pulau kecil di sekitar Banda Naira, Maluku -tempat pengasingan Hatta, Sjahrir, Tjipto Mangoenkoesoemo- juga telah dikapling-kapling investor. Sementara di daerah urban, kita melihat pabrik-pabrik multinasional milik kapitalis global telah lama berdiri kokoh di daerah Cikarang, Cengkareng, Tambun, Karawang, Cikampek, Sidoarjo, Pasuruan dan lain-lain.

Potongan bukti empiris itu apabila diabstraksikan cukup menandakan meredupnya ideologi alternatif di luar kapitalisme, bersama dengan dominannya neo-liberal,³⁴ seolah berakhir pula cita-cita keadilan sosial.

Perayaan kematian ideologi-ideologi di luar kapitalisme menyebabkan kekosongan cangkang metafisika tidak dengan sendirinya dibiarkan melompong. Kekosongan cangkang metafisika segera diisi ideologi yang paling tua, yakni ideologi berbasis agama. Paradoksnya, pengisian oleh radikalisme agama ini terjadi secara "sodomakis", yakni mempunyai potensi menghancurkan demokrasi tempat di mana ia tumbuh.³⁵ Ideologi berbasis agama sebenarnya bukan hanya monopoli Islam.³⁶ Agama-agama lain telah mengenal ideologisasi agama jauh lebih

³⁴ Rachel S. Turner menggambarkan bagaimana neo-liberal menjadi ideologi yang dominan. Ia menuliskan, *"The final dominant principle of neo-liberalism is private property. A system of full private ownership forms an indispensable part of a neo-liberal social order, reinforcing the irreplaceable value of the individual against the collective. To neo-liberals, the institution of private property and its corollary, the free market, act as a vehicle for decentralising decision-making and for placing it at the level of the individual. The concept goes to the heart of the public-private divide and, consequently, of liberalism itself, by conceptually delineating a sphere of private ownership and autonomy that no state institution may legitimately invade."* Rachel S. Turner, *Neo-Liberal Ideology, History, Concepts and Policies* 5, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008, hlm. 192.

³⁵ Robertus Robet, *Manusia Politik: Subyek Radikal dan Politik Emansipatoris di Era Kapitalisme Global* menurut Slavoj Zizek, PT Wahana Aksi Kritika, Tangerang, 2010, hlm. 9.

³⁶ Ibn Warraq membahas beberapa kesalahpahaman tentang penyebab terorisme Islam. Banyak sarjana menolak untuk mempertimbangkan kepercayaan para teroris, dan banyak yang tampaknya berpikir bahwa "terorisme Islam" telah muncul hanya dalam empat puluh tahun terakhir. Banyak analis percaya bahwa Amerika Serikat menjadi sasaran karena kebijakan luar negerinya, sementara yang lain berpendapat bahwa kita harus menggali akar penyebab kemiskinan sosial ekonomi. Ibn Warraq meneliti serius kepercayaan para jihadis. Menurut Ibn Warraq, tindakan ISIS, Taliban atau kelompok jihadis lainnya bukanlah tindakan kekerasan acak oleh gerombolan psikopat, frustrasi seksual, pengacau yang miskin, tetapi operasi yang direncanakan dengan cermat dan strategis yang merupakan bagian dari kampanye panjang oleh orang-orang yang berpendidikan yang ingin mewujudkan pembentukan negara Islam berdasarkan syariah, Gerakan jihadis, telah muncul pada abad

awal misalnya Kristen Evangelikal, Neo-Calvinis, fundamentalisme Hindu, dan sebagainya.³⁷

Refleksi

Abad 21 ini kita menghadapi situasi pergeseran paradigma yang sangat mendasar dan terlihat saling berkontradiksi. Tendensi-tendensi kontradiksi itu terlihat sama kuat. Di satu sisi, selesainya perang dingin, volume ideologisasi semakin mengecil dan masyarakat semakin pragmatis, tetapi pada saat yang sama, di sisi yang lain, dogmatisme muncul dalam bentuk fundamentalisme agama semakin menguat. Di tambah, 'bakteri' korupsi semakin berkembang biak menggerogoti sendi-sendi negara bangsa hingga menjadi semakin ringkih. Inilah tantangan Pancasila pada abad 21.

Secara normatif Pancasila adalah ideologi bangsa. Dikatakan normatif karena pernyataan itu berada di level seharusnya, dan bukan senyatanya. Kita mendudukan Pancasila sebagai ideologi yang final, namun disadari atau tidak, bangsa ini telah berjalan terlalu jauh ke arah kapitalisme, juga mulai ke arah tebing intoleransi. Kita nyaris tidak pernah merefleksikan eksistensi Pancasila, karena apa yang final tidak perlu direfleksikan. Sebagai ideologi yang final, Pancasila dianggap sumber dari segala sumber hukum. Pancasila diandaikan telah memuat segala-galanya sehingga suatu sistem hukum dapat diciptakan dari mengambil saripati Pancasila dengan jalan deduksi. Pancasila diandaikan sebagai konsep metayuridis yang sudah jelas, seperti "Lampu Aladin" yang jika kita menginginkan apa saja akan terkabul. Aksioma ini jelas menyederhanakan persoalan, karena Pancasila hanya memuat serangkaian nilai-nilai yang masih abstrak. Implikasinya seperti reifikasi, yang tidak ada kemudian dibendakan seolah-olah konkrit.

ketujuh dengan berusaha untuk menghidupkan kembali Islam yang "benar", dan hendak mengganti ideologi yang tidak sesuai dengan cita-cita Islam paling awal. Ibn Warraq meneliti dengan teliti tulisan-tulisan para pemikir Islam kunci di masa lalu, seperti Ibn Taymiyyah, dan aktivis modern, dari Mawdudi hingga Khomeini. Lihat: *Ibn Warraq, The Islam in Islamic Terrorism: The Importance of Beliefs, Ideas, and Ideology*, New English Preview Press, Nashville, 2017.

³⁷ Lihat: As'ad Said Ali, Pertarungan Ideologi:Indonesia Kini, 5 Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen, Maret - April 2009, hlm.29-41.

Ideologi-ideologi lain seperti sosialisme dan kapitalisme memberi pedoman yang jelas mulai dari dasar teoritik hingga pada instrumen operasionalnya sehingga cenderung rigid-deduktif. Sementara Pancasila “hanya” serangkaian 5 (lima) sila yang abstrak. Tetapi Pancasila seringkali diklaim digali dari kepribadian bangsa. Padahal Pancasila lahir dari proses perdebatan dan konsensus pada masa darurat-politik yang menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda waktu itu dari kalangan nasionalis, agama, dan sosialis (lihat, dokumen sidang BPUPKI) terutama untuk mempersiapkan dasar yang di atasnya akan dibangun bangunan negara Indonesia merdeka.

Sidang BPUPKI merupakan laboratorium yang istimewa untuk melihat bagaimana ideologi atau cita-cita masyarakat masa depan bisa diperbincangkan secara deliberatif dan terbuka untuk diperbaharui. Kekeliruan kita, menganggap konsensus para pendiri bangsa tersebut sebagai suatu yang final sehingga nyaris tidak pernah direfleksikan.

Bercermin dari pengalaman deliberatif para pendiri bangsa, seharusnya Pancasila dilihat bukan hanya ideologi melainkan juga filsafat yang membuka ruang diskursus. Kelebihan Pancasila dibanding ideologi-ideologi lain yang rigid, ia serangkaian 5 (lima) sila yang abstrak sehingga masih memungkinkan sebagai ideologi yang terbuka untuk ditafsirkan.

Setelah reformasi, secara retorik banyak orang mengatakan sebaiknya Pancasila bukan lagi ideologi tertutup melainkan sebagai ideologi terbuka. Jika benar mendudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, berarti mengandaikan Pancasila sebagai ideologi yang belum selesai, tetapi proses yang “menjadi”.

Lalu, apakah ideologi tidak berakhir pada pluralitas sehingga tidak ada lagi ikatan kolektif dalam negara bangsa? Atau kemungkinan yang terburuk, negara terancam “punah” karena fundamen negara di “modifikasi”?

Idealnya, Pancasila menjadi ‘ideologi’ yang terus “menjadi” yakni, setiap orang diberikan ruang mengimajinasikan bagaimana tentang masa depan masyarakat Pancasila yang dicita-citakan. Tentu, satu hal Pancasila sebagai ideologi, ada lapisan nilai-nilai dasar yang disepakati untuk tidak diubah misalnya 5 (lima) sila sebagai ‘engsel’ bangsa.

Dari satu sudut pandang kiranya dapat dinyatakan bahwa dalam pluralitas, tentu masih ada titik-titik kesamaan yang menjadi ikatan kolektivitas bermasyarakat, karena jika tidak maka semuanya akan berjalan sendiri-sendiri. Artinya, pluralitas tidak berakhir pada *incommensurable*, suatu yang tak dapat dibandingkan. Toh buktinya, negara tidak bubar atau punah, dan kehidupan bermasyarakat masih berlangsung hingga sekarang meski ideologi tidak bekerja karena sedang dirawat di ruang *Intensive Care Unit* (ICU).

Pada fase 'krisis' ini, yang diperlukan adalah refleksi kritis disertai dengan pengambilan sikap atau aksi yang nyata merespon situasi paska ideologi. Selama ini, tanggung jawab pengembanan Pancasila seolah hanya berada di pundak guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), atau para elite yang duduk di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Praksis pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga relatif monoton dan doktriner. Pendidikan Pancasila lebih menghafal materi yang diambil dari buku teks pelajaran saja, tetapi lepas dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Pada era paska ideologi, tidak mungkin memaksakan ideologi untuk diyakini begitu saja, atau cara yang lebih hegemonik yaitu penundukan tanpa perlawanan. Baik praktik dominasi maupun hegemoni membuat ideologi menjadi beku, tidak berkembang, dan seringkali menutupi praktik diskriminasi, ketidakadilan, intoleransi dan sejenisnya yang terjadi di sekitarnya. Di sinilah seni ideologi di era paska ideologi, menari "*whirling dervhises*" di tengah masyarakat yang apatis dengan narasi-narasi besar.

Lebih jauh, saya tertarik dengan kehidupan sel. Sebagaimana temuan para ahli biologi masing-masing kita terdiri dari kombinasi lebih dari 30 (tiga puluh) trilyun sel individual. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding jumlah bangsa Indonesia. Setiap sel dan mikro organisme itu adalah makhluk individual yang dengan kemampuan sendiri mengarahkan diri-sendiri, bergabung bersama dalam suatu aliansi yang mengatur diri sendiri dan terus menerus memperbaharui diri. Sepanjang umurnya, organisme itu memperbaharui tatanan fisiknya melalui kematian dan penggantian sel. Dalam tubuh manusia, kira-kira tiga milyar sel mati

setiap menit yang masing-masingnya secara sepadan digantikan oleh sebuah sel hidup sejenis. Artinya, setiap makhluk hidup mempunyai pengetahuan dan kesadaran batin tentang dirinya sendiri. Menariknya, jika timbul kebutuhan khusus, seperti ketika dalam keadaan terluka, sumber-sumber yang tersedia langsung diarahkan pada sel-sel yang tepat. Karakter sel yang mengagumkan mempunyai kehidupan untuk bekerjasama secara tolong menolong. Tidak ada penumpukan bagi kepentingan diri-sendiri.³⁸ Saya mengimajinasikan, apabila setiap warga merefleksikan Pancasila sebagaimana sel yang merawat sustainabilitas “*living system*”nya tanpa merasakan sebagai beban, maka dalam kehidupan sehari-hari Pancasila menjadi nilai, budaya dan ideologi yang hidup, karena dijalankan dengan kesadaran otonom.

Pengembangan nilai-nilai Pancasila, tidak cukup dipelajari sebagai pengetahuan, melainkan juga ditransformasikan pada ranah afektif dengan merespon masalah kekinian. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk misalnya, Pancasila menegaskan posisi ideologinya menjamin keadilan multikultural yang melindungi semua kelompok yang ada di dalam masyarakat, baik yang minoritas maupun mayoritas. Keadilan multikultural, tidak hanya menekankan soal keragaman, melainkan juga mencairkan sekat-sekat yang menyebabkan intoleransi dengan membuka dialog atau diskursus multi-identitas kebangsaan. Hal ini berarti keadilan multikultural bukan hanya dibebankan pada pundak negara, yang tak kalah penting adalah kesadaran toleransi warga masyarakat atas keragaman.

Sebagai ‘kontras penanda’, Pancasila juga perlu menegaskan dirinya sebagai ideologi yang berbeda dengan ideologi dominan, kapitalisme. Sistem kapitalisme yang bertumpu pada mekanisme pasar tidak hanya menyebabkan kesenjangan sosial, melainkan juga sebagai penyebab ketidakadilan sosial di mana kelompok rentan terpelanting ke pinggir. Negara tidak boleh pasif dan

³⁸ Robert A. Weinberg, “*How Cancer Arises*,” <https://courses.washington.edu/gs466/readings/Weinberg.pdf> (diakses pada tanggal 21 April 2019). Lihat juga, Humberto R. Maturana dan Francisco J. Varela, *Autopoiesis and Cognition*, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980.

menyerahkan kedaulatannya pada mekanisme pasar, melainkan harus hadir memperluas distribusi misalnya melalui program landreform dan pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik (*public expenditure*) dalam Anggaran Pembelanjaan Biaya Negara (APBN) dan kebijakan publik yang mengikat untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecceh dalam pembangunan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Auguste Comte, A General View of Positivism (1865)*, trans. H.J. Bridges, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
- Daniel Bell, The End of Ideology, The Free Press, New York, 1960.*
- Daniel Bell, The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in Fifties, The Free Press, New York, 1960.*
- Eliane Glaser, Anti-Politics: On the Demonization of Ideology, Authority and the State, Repeater, Books, London, 2018.*
- F. A. Hayek, The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, Vol. 1 of The Collected Works of F. A. Hayek, ed. W. W. Bartley III, University of Chicago Press, Chicago, 1989.*
- Ferry Hidayat, Pancasila: Perspektif Pendiri RI dan Problematikanya, STIBA Pertiwi, Bekasi, tanpa tahun.
- Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, 1992.*
- G.W.F. Hegel, The Phenomenology of Mind, trans. B.J. Baillie, Blackmask Online, 2001.*
- Hanna Samir Kassab, The Power of Emotion in Politics, Philosophy, and Ideology, Palgrave Macmillan, New York, Basingstoke, 2016.*
- Humberto R. Maturana dan Francisco J. Varela, Autopoiesis and Cognition, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980.*
- Ibn Warraq, The Islam in Islamic Terrorism: The Importance of Beliefs, Ideas, and Ideology, New English Preview Press, Nashville, 2017.*
- Jonathan Wolff, Why Read Marx Today, Oxford University Press, Oxford, 2002.*
- Jürgen Habermas, Communication and The Evolution of Society, Heinemann, London, 1979.*
- Milton Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1962.*
- Muhammad Hatta dan Zainul Yasni, Bung Hatta Menjawab: Wawancara Dr. Mohammad Hatta dengan Dr. Z. Yasni, Gunung Agung, Jakarta, 1980.
- Rachel S. Turner, Neo-Liberal Ideology, History, Concepts and Policies, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008.*
- Raymond Aron, The Opium of the Intellectuals, Norton, New York, 1962.*

- Reo M. Cristenson (et.al), *Ideologies and Modern Politics*, Dodd, Mead & Company, New York, 1975.
- Rian Adhivira Prabowo, *Homo Sacer 1965: Perampasan Hak Dan Pelampauan Atasnya*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2015.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Edisi ke IV, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998.
- Robertus Robet, *Manusia Politik: Subyek Radikal dan Politik Emansipatoris di Era Kapitalisme Global menurut Slavoj Zizek*, PT. Wahana Aksi Kritika, Tangerang, 2010.
- Rolf Petri, *A Short History Western Ideology. A Critical Account*, Bloomsbury Publishing, London, 2018.
- Seymour Martin Lipset, *Political Man*, Heinemann, London, 1960.
- Wawan Tunggal Alam (ed.), *Bung Karno Menggali Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Wawan Tunggal Alam, *Demi Bangsaku Pertentangan Bung Karno vs. Bung Hatta*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity*, Polity Press, Cambridge, 2000.

Artikel:

- As'ad Said Ali, *Pertarungan Ideologi: Indonesia Kini*, 5 Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen Maret – April 2009.
- John Schwarzmantel, *Hegemony and Contestation in Post-Ideological Society*, Paper to be presented at the ECPR Joint Sessions of Workshops, Uppsala, 13-17 April 2004.
- Khalid Azees & Alejandra Gaitan-Barrera, *Power, Ideology, Politics and the Revolutionary Subject*, 45 Critique Journal of Socialist Theory 2017.
- Michael Freeden, *Confronting The Chimera of A 'post-ideological' Age*, Paper to be presented at the ECPR Joint Sessions of Workshops, Uppsala, 13-17 April 2004.
- Widodo Dwi Putro, *Pertikaian Ideologi: Dari "Hubungan Produksi" sampai "Kesadaran"*, Kompas, 23 September 2002.

Internet:

- <https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-ideological>.
- <http://bangka.tribunnews.com/2016/04/10/zaskia-gotik-sila-bebek-nungging-hingga-jadi-duta-pancasila>.
- Douglas Kellner, *"Ernst Bloch, Utopia and Ideology Critique Douglas Kellner"* dalam artikel lepasnya *"Ernst Bloch, Utopia and Ideology Critique"*, diakses pada tanggal 28 November 2008 dalam <http://www.uta.edu/huma/illuminations/kell1.htm>
- Robert A. Weinberg, *"How Cancer Arises,"* diakses pada tanggal 22 April 2019 dalam <https://courses.washington.edu/gs466/readings/Weinberg.pdf>

Peraturan:

- TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.